

Abstract

The History of politics development in Indonesia, the really can't forget the role of muslim people groups in national politics stage, one of them named Muhammadiyah organization. This big organization found since 1912 by KH. Ahmad Dahlan with struggles main basic, bringing muslim people back to really confidence, which is that pure leaning to Qur' an and hadits and not to another one. Politic action form's manifested on three movement patterns: revivalism, secularism and modernism. In revivalism pattern, Muhammadiyah struggle's have given its contribution to BPUPKI about year 1945 as alternative solution divides state basics. secularism is not amends, meanwhile modernism declares that Islamic teaching can be fused by politics or state problem can be carried on concurrently so forms symbiotic relationship among religion with state or politics.

خلاصة

لا يفرق بين تاريخ الشعب الإندونيسي وتاريخ الأمة الإسلامية ومنها وجود الجمعية المحمّدية. وقد أسّسها أحمد دحلان عام 1912 لترجيع الأمة الإسلامية الى إعتقاد صحيح سالم موافق بالقران والحديث. ومن أفكارها السياسي هي الشمولة والتنوعية والحديثية. وفي شمولتها كانت في هذه الحركة لها نظر نافع للجنة الإستعدادية للحرية الإندونيسية في عام 1945 إبتداءاً لأساس الدولة. ولا تتقدم فيها التنوع، و اما نظرها الحديثية هي أن بين الإسلام والسياسة علاقة متسددة

Kata Kunci:

Muhammadiyah, Sejarah Organisasi, Kiprah Politik,
Revivalisme dan Modernisme

Pendahuluan

Sebagai organisasi massa yang besar dengan jumlah massa yang mencapai puluhan juta orang, tidak dapat dipungkiri bahwa Muhammadiyah mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah secara langsung atau tidak langsung ikut serta mewarnai perjalanan sejarah bangsa yang penuh dengan haru biru.

Muhammadiyah bangkit sebagai gerakan atau organisasi yang bercirikan modernis atau organisasi keagamaan modern. Organisasi yang didirikan tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan adalah organisasi Islam dengan tujuan esensi untuk menyebarkan agama Islam baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Misi utamanya meluruskan keyakinan yang menyimpang, menghapuskan perbuatan yang dianggap bid'ah seperti penghormatan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Saman dan lain-lain yang terkenal dengan *manakiban*, pembacaan Barzanji, perayaan haul, pembacaan Yasiin khusus pada malam jum'at dan malam-malam tertentu sesudah hari ke 7, 40 atau ke 100 kematian.

Sebagai organisasi atau pergerakan organisasi sosial, Muhammadiyah berkecimpung dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial. Dari ciri pergerakannya ini munculah sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi serta panti-panti asuhan, rumah-rumah bersalin, pantai-panti jompo dan lain-lain.

Pergerakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan, mempertahankan dan mewarnainya merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari peran serta Muhammadiyah dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Munculnya Ahmad Dahlan, Mas Mansyur dalam perjuangan kemerdekaan merupakan hal yang nyata dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Dilihat dari hal tersebut, Muhammadiyah merupakan kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh oleh siapapun. Muhammadiyah berperan penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertitik tolak dari sini ada beberapa persoalan penting yang memerlukan penajaman antara lain bagaimana sejarah dan kiprah politik Muhammadiyah, wawasan pergerakan, pemikiran keislaman, pemikiran sosial pendidikan, sosial ekonomi dan lain-lain.

Sejarah Singkat Organisasi Muhammadiyah

Seperti telah disinggung sebelumnya, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang kiprahnya cukup besar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan. Organisasi ini dilatarbelakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah (1263-1328). Ia berupaya mengoyak kemandekan berpikir umat Islam yang kala itu dikatakan sudah terlampaui terikat dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Gerakannya disebut "*Muhyi Atsaris Salaf*", yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama (yang dibawa para sahabat rasul dan tabi'in). Pemikiran Ibn Taimiah ini antara lain mempengaruhi Syekh Muhammad Abdul Wahab (1701-1793). Gerakannya terkenal dengan nama Gerakan Wahabiyah. Gerakan ini pertama kali di bawa ke tanah air di tanah Minangkabau yang dibawa oleh orang-orang Minang yang pergi haji ke Mekah. Di Jawa arus pembaharuan itu melahirkan dua jenis organisasi yang memiliki visi yang berbeda. Yang pertama adalah Sarekat Dagang Islam yang lahir pada tahun 1911 yang kemudian menjadi - dan lebih dikenal- Sarekat Islam. Dan pada waktu terlibat politik yang lebih jauh namanya berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Organisasi lainnya yang juga terpengaruh oleh pembaharuan di Timur Tengah adalah Persatuan Islam, Jami'atul khair, Al-Irsyad dan Muhammadiyah, berkembang menjadi organisasi keagamaan yang besar dan berpengaruh. Khususnya Muhammadiyah, organisasi ini berkembang menjadi organisasi sosial keagamaan yang besar dan berpengaruh serta

mempunyai massa yang mencapai puluhan juta orang. Muhammadiyah yang berkembang dari kota pelajar dan budaya Yogyakarta, kini keberadaannya hampir di seluruh penjuru tanah air.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dalam menjalankan aktivitasnya lebih menekankan pada gerakan dakwah amr ma'ruf nahyi munkar. Dakwah yang ada adalah dakwah yang terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri yaitu *ad da'wah ila daris-salam, ad da'wah ilallah, ad da'wah ilal jannah, ad da'wah ilal khair* dan sebagainya. Dakwah Muhammadiyah itu dalam pengertian *social reconstruction* yang jelas bersifat multidimensional. Sebagai gerakan dakwah yang bersifat multidimensional Muhammadiyah mesti akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan konteks dimana ia hidup.

Berdasarkan inilah Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, universitas-universitas, masjid-masjid, pondok-pondok pesantren dan lainnya dalam rangka gerakan dakwahnya. Di samping itu Muhammadiyah juga bergerak dalam bidang ekonomi dengan berusaha memberdayakan perekonomian rakyat, misalnya mendirikan BPR untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil.

Muhammadiyah yang mengklaim dirinya sebagai kaum modernis dalam pemikirannya berusaha mengembalikan ajaran Islam murni berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits. Mereka menolak ajaran-ajaran agama Islam yang dicampur-adukakan dengan hal-hal lain yang tidak punya dasar hukum yang kuat baik itu dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW, misalnya adalah adanya selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari setelah hari kematian seseorang serta peringatan wafatnya seseorang atau khaul setiap satu tahun sekali, pembacaan Barzanji dan sebagainya. Akidah yang dianut oleh Muhammadiyah adalah *aqidak shahihah* yaitu akidah yang berorientasi pada akidah salaf dengan mengikuti secara mutlak jejak rasul dan sahabat. Jadi akidah muhammadiyah tidak mengikuti salah satu dari empat

mazhab yang ada. KH. Sahlan Rasyidi menjelaskan identitas *aqidah shahihah* sebagai akidah yang memiliki ciri: (1)menolak kufur dan atheism, (2) akidah berdasarkan teologi dan falsafah, (3) akidah Ahmadiyah yang melakukan ta'wil secara ekstrim kepada pokok-pokok akidah sehingga membawa perubahan yang prinsipil pada akidah salaf, (4) Akidah mengerjakan ajaran *manunggaling kawula lan Gusti* (menyatunya hamba dengan Tuhan), (5) menolak akidah yang mengajarkan panteisme, (6) menolak akidah nonwahyu yang bersendikan kebudayaan (galian dari nenek moyang) sebagaimana yang dianut aliran kepercayaan dan kebatinan, (7) menolak akidah yang mengajarkan hierarkhi ruhani/kependetaan, (8) menolak akidah yang membenarkan paham sekularisme, (9) menolak akidah yang bersendikan falsafah humanism nom-agamis, (10) menolak paham sinkretisme yang menganggap semua agama benar, (11) menolak paham koeksistensi religious (menyatukan antar agama di dunia dengan melakukan sintesa/perpaduan antar ajaran agama sedunia.

Pada dasarnya tujuan Muhammadiyah dalam kiprahnya terhadap bangsa Indonesia meliputi beberapa bidang yaitu: sosio-agama, sosio-pendidikan, dan sosio politik.

Sosio-Agama

Gambaran sosio-agama di Indonesia dalam konteks keindonesiaan bisa dimulai ketika Islam menancapkan dan mengokohkan keberadaannya di nusantara pada abad XIII Masehi. Sebelum agama-agama datang penduduk nusantara mempunyai kepercayaan bahwa bukan hanya manusia yang berjiwa, tumbuh-tumbuhan dan hewan pun berjiwa. Mereka mempercayai dan menyembah arwah orang yang sudah meninggal karena ada anggapan bahwa orang yang sudah meninggal mempunyai pengaruh yang kuat dan langsung terhadap orang-orang yang masih hidup. Menurut Hamka, hal itu disebabkan karena alam sekeliling, serta masalah hidup dan mati. Kepercayaan inilah yang dinamakan *animism*.

Hal inilah yang lebih banyak berakulturasi dengan ajaran Hindu dan Budha yang lebih dahulu berkembang dan tersebar di Indonesia, sehingga muncullah paham sinkretisme yang ada dalam jiwa bangsa Indonesia.

Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi *khurafat* dan *bid'ah*. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Qur'an dan sunnah shahihah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ibadah (ritual), tetapi pengetahuan Islamnya berasal dari sumber Islam. Bentuk khurafat misalnya memohon kepada Mbah Urekso, sementara bentuk bid'ah misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlilan yang menggunakan lafal Islam.

Hal ini merupakan konsekuensi dari metode dakwah yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia tempo dahulu, yang lebih memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam, sementara budaya lokal apabila dilihat dari kondisi sekarang kurang kondusif dengan deskripsi ajaran Islam yang ril, akan tetapi metode dakwah yang menggunakan akulturasi dan sinkretisasi seperti itu memang cepat menarik simpati masyarakat pada saat lampau. Secara kuantitatif pemeluk Islam bertambah, sehingga dalam perkembangannya umat Islam merupakan mayoritas, namun demikian intensitas beribadah mereka masih kurang mantap.

Realitas sosio-agama ini mendorong organisasi Muhammadiyah untuk eksis, dan konsisten terhadap garis perjuangan yang telah ditetapkan, tidak mengherankan apabila Munawir Sadzali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami.

Sosio-Pendidikan

Dalam perkembangannya pendidikan di Indonesia terpecah menjadi dua: *pertama*, pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama. *Kedua*, pendidikan barat yang sekuler. Sejak permulaan abad

kedua puluh, jurang yang memisahkan antara golongan yang mendapatkan pendidikan sekuler tanpak semakin melebar. Jurang itu termanifestasikan dalam aktivitas-aktivitas sosial dan intelektual, dalam berpakaian, berbicara, hidup dan berpikir. Untuk menghilangkan perbedaan itu, Muhammadiyah lahir dan berusaha untuk mewarnainya.

Dua sistem pendidikan tersebut bermuara pada dua induk pendidikan yang saling terpisah: pesantren yang berinduk pada legitimasi masyarakat dan komunitas Islam, dan pendidikan barat kolonial yang berinduk pada legitimasi pemerintah. Kedua system pendidikan tersebut merupakan kesatuan sistem usaha untuk membina kepribadian dan perekayasaan manusia agar dengan kemampuan yang dimilikinya anak didik dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya serta mendukung kelangsungan masyarakat induknya.

Dari realitas pendidikan itu, Muhammadiyah menjawab tantangan tersebut dengan karya nyata diantaranya pendidikan yang diselenggarakannya.

Pemikiran Politik Muhammadiyah

Pemikiran politik Islam terbagi tiga macam: revivalisme, sekularisme dan modernisme. *Pertama*, revivalisme, yaitu paham yang menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan hal yang sifatnya universal dan mencakup segala-galanya sehingga segala persoalan ada dalam ajaran Islam (Al-Qur'an dan al-Hadits). Aliran ini dipelopori oleh para pemikir dan filosof Islam antara lain: Mohamad Rasyid Ridha, Abul A'la Almaududi, Sayyid Quthb, Hasan Ismail al Hudaiby, Hasan Al Banna.

Kedua, sekularisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Al-Qur'an tidak mengatur masalah politik atau negara. Lebih jauh lagi aliran ini berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa dengan tugas tunggal, yakni mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Muhammad tidak mendirikan dan mengepalai negara atau politik

sehingga negara dipisahkan dari agama. Aliran ini dipelopori oleh Thaha Husain, 'Ali Abd al-Raziq.

Ketiga, modernism, aliran ini berpendapat bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat sistem politik, tetapi terdapat seperangkat nilai-nilai etika bagi kehidupan politik. Pelopor aliran ini Muhammad Husain Haikal, Ibn Taimiyah, Muh. Abduh, Al-Ghazali dan al Mawardi. Dalam pemikiran ini ditegaskan bahwa politik/negara merupakan hubungan yang simbiotik dengan agama, sehingga negara akan baik jika dipadukan dengan agama.

Ketiga ragam pemikiran politik Islam di atas dijadikan dasar tela'ah yang dilakukan penulis dalam menganalisa pergerakan Muhammadiyah di Indonesia dalam realitas perpolitikan di Indonesia.

Revivalisme

Terpantul dari pergumulan Muhammadiyah yang diwakili tokoh-tokoh puncaknya, yaitu kejelasan informasi Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir, KH. Mas Mansyur dan Dr. Sukiman Wirjosandjojo, dalam membangun landasan negara bersama-sama dengan golongan Islam lainnya dan kelompok agenda dan perbincangan dalam sidang BPUPKI hingga membuat sidang cukup panas dan tegang ialah, *pertama*, Islam sebagai dasar Negara (aspirasi kelompok kebangsaan). Untuk isu ini mereka akhirnya mereka mencapai kompromi, yaitu bahwa negara berdasar pancasila, dengan penambahan anak kalimat pada sila pertama setelah ketuhanan, hingga berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Namun demikian, dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 terjadi perubahan, menjadi Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan berlaku hingga sekarang. *Kedua*, persyaratan beragama Islam bagi presiden dan wakil presiden. Dalam sidang BPUPKI 14 Juli 1945 telah disepakati dan diputuskan secara bulat bahwa persyaratan tersebut hanya bagi presiden, namun dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 persyaratan itu dihapus.

Corak revivalisme ini bisa dimengerti karena konteksnya berkaitan dengan upaya membangun dan

memberi warna dasar bagi tegaknya RI. Selain itu, golongan Islam termasuk Muhammadiyah juga baru pertama kali berpengalaman secara langsung dalam memperbincangkan politik dalam konteks Indonesia merdeka. Konteks dan pengalaman tersebut menjadikan aspirasi golongan Islam sangat formal legalistic. Dengan kata ini tidak hanya ciri Muhammadiyah tetapi juga ciri golongan Islam lainnya.

Modernisme

Gejalanya tampak pada perilaku politik Muhammadiyah yang menginginkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam non-politik tetapi tidak anti politik. Titik tolak perilaku politik ini adalah pemikiran terwujudnya persyarikatan. Realisasinya pada dua titik gerakan, yaitu pembaruan ajaran dan kemenangan dunia Islam.

Untuk titik gerakan pembaruan, Muhammadiyah tetap mempertahankan dan meningkatkan seperti yang selama ini dijalankan secara terus menerus, baik oleh generasi awal maupun generasi yang mengalami perkembangan kekinian, tentu dengan nuansa-nuansa baru yang sesuai dengan tantangan perkembangan zamannya. Sedangkan pada titik gerakan kemenangan dunia Islam Muhammadiyah tetap bekerjasama dengan seluruh potensi umat Islam, baik yang tergantung dalam organisasi kemasyarakatan dan politik maupun yang tidak.

Corak modernism perilaku politik Muhammadiyah ini mempunyai wujud pada akar sejarah Muhammadiyah. Pertama, pada periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (1945) dan kedua, pada periode parok kedua tahun 1960-an. Untuk periode pertama, corak ini tercermin dalam beberapa data sejarah, yaitu SI (Syarikat Islam) yang diwakili oleh HOS. Cokroaminoto dan Muhammadiyah yang diwakili Ahmad Dahlan membangun kekuatan umat Islam dalam sejarah perjuangan bangsa ini.

Pada periode kedua, yaitu parok kedua 1960-an (1966-1970), corak modernism perilaku politik Muhammadiyah tercermin dalam tiga peristiwa yang

dialami Muhammadiyah. Pertama, pengakuan wajah ganda Muhammadiyah oleh pemerintah orde lama dan orde baru, yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, dan sekaligus berfungsi sebagai organisasi massa politik (orsospol), sehingga Muhammadiyah banyak menempatkan orang-orangnya di DPR dan di MPR-Gotong Royong. Pengakuan orsospol terjadi pada akhir pemerintahan orde lama.

Kedua, peristiwa lahirnya Parmusi dengan SK presiden No. 70 tertanggal 20 Februari 1968 yang dibidani oleh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Aktivitas Muhammadiyah tersebut memperlihatkan bahwa persyarikatan ini membidani lahirnya partai politik Islam bagi umat Islam yang belum berpartai.

Ketiga, peristiwa siding tanwir 1969 di Ponorogo, Jawa Timur, yang memutuskan kebijakan strategi atau khittah perjuangan Muhammadiyah yang dikalangan Muhammadiyah lebih populer dengan istilah *khittah* Ponorogo. Khittah ini menegaskan bahwa cita-cita perjuangan Muhammadiyah hanya bisa diwujudkan melalui dakwah Islam dengan dua saluran serentak, yaitu saluran politik alatnya adalah organisasi politik atau partai politik, dan saluran masyarakat, alatnya adalah organisasi non-politik atau organisasi kemasyarakatan. Meskipun ada kesadaran bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang memilih menempatkan diri pada bentuk organisasi politik atau partai politik di luar Muhammadiyah yang menyalurkan aspirasi politik Muhammadiyah bersama dengan kekuatan umat Islam lainnya.

Sekularisme

Wujudnya tercermin pada perilaku politik Muhammadiyah yang menginginkan Muhammadiyah menjadi partai politik. Ide agar menjadi partai politik muncul pada awal orde baru, yaitu setelah gagasan untuk rehabilitasi Partai Masyumi gagal, dan upaya PII untuk hidup kembali juga gagal. Muhammadiyah memperoleh tawaran dari pemerintah untuk menjadi

partai politik. Namun kemudian digantikan oleh Parmusi.

Keinginan untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik ternyata mempunyai akar sejarah dalam Muhammadiyah meskipun hanya dalam gagasan atau usulan, dan tidak pernah berhasil diwujudkan. Pada muktamar Muhammadiyah 1918, gagasan agar Muhammadiyah menjadi partai politik digelindingkan H. Agus Salim tersebut. Namun, gagasan tersebut tenggelam setelah KH. Ahmad Dahlan menjelaskan tentang Islam yang ditawarkan Muhammadiyah serta konsekuensi kepelemukan Islam, serta adanya kenyataan bahwa sebagian besar umat dan subjek sumber daya manusia Muhammadiyah belum memadai.

Tiga corak perilaku politik Muhammadiyah ini akan mewarnai perkembangan Muhammadiyah selanjutnya. Eksistensinya wujud sekularisme memang tidak pernah ada dalam sejarah Muhammadiyah, namun sebagai gagasan, corak ini muncul juga dalam putaran sejarah dan dinamika Muhammadiyah.

Penutup

Dalam konteks kesejarahan, Muhammadiyah merupakan organisasi massa yang hendak merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang lebih bersifat mengembalikan Islam kepada hal yang murni, yaitu ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, dengan didasarkan atas Al-Qur'an dan al-Hadits, tidak atas dasar budaya local yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam, malahan dapat dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini dibuktikan oleh Muhammadiyah melalui dakwah yang dilakukan dengan berbagai cara yang lebih modernis. Upaya untuk merealisasikan ini adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal yang memadukan pola pendidikan barat yang sekuler dengan pendidikan Islami yang selaras dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadits sehingga banyak dijumpai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tanpak lebih maju dan lebih terarah untuk menciptakan insane kamil yang berislami.

Dalam wacana perpolitikan, Muhammadiyah telah berperan aktif sejak zaman Hindia Belanda, ia berusaha memberikan perlawanan kepada pemerintah colonial dengan berbagai upaya, baik itu melalui penggalangan umat Islam agar dapat menuntut kemerdekaan.

Dalam gerakan pemikiran dapat dibedakan atas revivalisme, sekularisme dan modernism. Corak revivalisme terlihat dari perjuangan Muhammadiyah dalam memberikan sumbangannya kepada BPUPKI dalam mencari solusi alternative bagi dasar Negara sekitar tahun 1945. Tokoh-tokoh Muhammadiyah beserta tokoh Islam lainnya memasukkan dasar Negara Islam ke dalam konstitusi. Corak modernism merupakan pokok dari misi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya sampai sekarang ini dimana ajaran Islam dapat dipadukan dengan masalah politik atau negara yang dapat dijalankan secara bersamaan sehingga membentuk hubungan yang simbiotik antara agama dengan negara atau politik. Sementara aliran sekularisme lebih cenderung dikembangkan oleh massa Muhammadiyah di luar atau orang Muhammadiyah yang terpinggirkan atau merasa jenuh dengan gerak langkah Muhammadiyah selama ini, akan tetapi sekularisme cenderung tidak laku dalam tubuh Muhammadiyah sendiri.

Daftar Pustaka

- Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muh. Abduh: Suatu Studi perbandingan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Sirodjudin Abbas, *I'tiqad Muhammadiyah dan NU, Reorientasi Wawasan Keislaman*, LPPI UMY-LKPSM NU dan Al-Muhsin Yogyakarta, 1993.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1987.
- Abdul Kahar Muzakir, *Konsepsi Negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1953.

- Deliar Noer, Islam, *Pancasila dan Asas Tunggal*, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984.
- Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Grafiti, Jakarta.
- S.U. Bajusut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*, Documenta, Surabaya, 1972.
- Muhammad Natsir, *Capita Selecta*, S'Gravenhage, Bandung, 1954.
- Munawir Sadzali, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Pembaharu*, Makalah pada Seminar menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-43 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta pada akhir tahun 1994.
- Mukti Ali, *Interpretasi tentang Amalan Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah No. 22-23/65 tahun 1985.

